

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Terpilihnya Recep Tayyip Erdogan sebagai Perdana Menteri Turki dan kemenangan partai Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP)¹ pada pemilihan umum tahun 2002 menjadi awal dari kebangkitan kembali identitas dan nilai-nilai Islam di negara Turki. Timbul kekhawatiran baik dari pihak domestik ataupun eksternal jika politik luar negeri Turki dibawah pemerintahan Erdogan akan cenderung condong terhadap wilayah Timur Tengah terlebih kepada dunia Islam.² Bertolak belakang dengan kekhawatiran yang ada, Erdogan bersama dengan partai AKP dan Ahmet Davutoglu sebagai Menteri Luar Negeri memformulasikan politik multi dimensi sebagai kebijakan luar negeri Turki. Sebuah kebijakan untuk mengembangkan hubungan luar negeri menuju kawasan yang lebih luas dan beragam. Erdogan juga berkeinginan untuk memanfaatkan letak geografis dengan menjadikan Turki bukan hanya sekedar jembatan penghubung antara Timur dan Barat namun juga sebagai salah satu aktor global dalam politik internasional.³

Turki oleh Mackinder dikategorikan sebagai negara Eurasia yang secara geografis berada diantara Benua Eropa dan Asia yang juga termasuk dalam wilayah *heartland*, dan hal ini tentu berimplikasi terhadap kondisi demografi dan identitas nasional negara Turki. Negara yang masuk kategori Eurasia seperti Turki

¹ Partai AKP didirikan oleh Erdogan pada tanggal 14 Agustus 2001. Merupakan partai turunan dari partai Islam Azilet yang dipimpin tokoh islamis dan mantan Perdana Menteri Turki Necmettin Erbakan

² Henri J Barkey. "Turkish Foreign Policy and Middle East." *CERI Strategy Papers*, 2011

³ Syarif Taghian, *Asy-Syaikh Ar-Rais Rajab Thayyib Erdogan-Mu'addzin Istanbul Wa Muhathim Ash-Shanam Al-Ataturki* (2011), trans. Masturi Ilham, Malik Supar (Jakarta:Pustaka Al Kautsar, 2013), 254.

atau Rusia terdapat kecenderungan memiliki dualisme identitas dalam hal ini identitas Eropa atau identitas Asia.⁴ Bagaimana dualisme identitas nasional bisa terbentuk Turki tidak hanya karena faktor geografis namun juga dikarenakan dinamika internal serta sejarah panjang Turki semenjak era kekaisaran Ottoman hingga pemerintahan Erdogan.

Turki di masa Kekaisaran Ottoman memiliki wilayah kekuasaan mulai dari daerah Balkan, Anatolia, jazirah Arab. Cakupan wilayah kekuasaan yang luas berdampak terhadap kondisi masyarakat yang variatif baik secara agama, suku, ras. Meski kondisi masyarakat tergolong heterogen namun, secara teori Kekaisaran Ottoman identik dengan identitas dan nilai-nilai Islam yang dibuktikan dengan diberlakukan hukum syariah Islam.⁵ Meski memberlakukan hukum syariah Islam, namun Ottoman juga menerapkan hukum sekular untuk menaungi kelompok masyarakat non-islam. Reformasi kemudian terjadi di Turki ketika Kemal Ataturk menjadi pemimpin Turki pada tahun 1923. Keinginan Ataturk untuk membentuk Republik Turki yang modern dilakukan dengan jalan reformasi untuk menghilangkan sistem khilafah yang identik dengan nilai-nilai Islam dan dengan digantikan sistem republik.⁶ Tidak hanya melakukan redefinisi terhadap sekularisme, pemerintahan Ataturk kemudian melakukan definisi ulang terhadap identitas nasional, politik, agama, budaya. Reformasi juga dilakukan oleh Ataturk terhadap politik luar negeri Turki yang pada era Ottoman dekat

⁴ Eldar Ismailov and Vladimer Papava, *Rethinking Central Eurasia* (Washington : John Hopkin University, 2010), 84-101.

⁵ Erik J. Zürcher, *Turkey : A Modern History* 3rd ed (London : I.B. Tauris, 2004), 10.

⁶ Zürcher, *Turkey : A Modern History*, 166-168.

dengan Timur Tengah diubah menjadi Eropa sentris.⁷ Reformasi di setiap sektor baik yang bersifat internal ataupun eksternal secara total dilakukan oleh Ataturk agar cita-cita untuk melakukan modernisasi terhadap Turki bisa terwujud dalam jangka waktu yang cepat. Perubahan politik luar negeri yang dijalankan oleh Ataturk sejalan dengan keinginan Ataturk untuk memodernisasi dan meningkatkan perekonomian Turki melalui industrialisasi yang sangat erat kaitannya dengan peradaban Barat.⁸

Perang Dingin menjadi masa ketika Turki dipandang memiliki posisi penting bagi negara-negara sekutu hingga berdampak pada peningkatan intensitas hubungan karena negara-negara sekutu memiliki kepentingan menjadikan Turki sebagai *Buffer State*. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan wilayah pengaruh komunisme Rusia, Turki mendapatkan perhatian utama dan menjadi salah satu negara penerima dana Marshall Plan sebagai usaha untuk membendung penyebaran ideologi komunisme dan membuat Turki semakin dekat dengan pihak Barat. Arah politik luar negeri Turki dengan Eropa menuju ke arah yang positif dengan bergabungnya Turki sebagai anggota dalam organisasi-organisasi negara Eropa seperti NATO pada tahun 1952 sebagai upaya lanjutan untuk menjalin kerjasama keamanan. Tidak hanya menjadi anggota NATO, Turki pada tahun 1959 mengajukan aplikasi untuk masuk menjadi anggota *European Economic Community* (EEC)⁹ sebagai langkah awal untuk tergabung dalam

⁷ Samuel P Huntington, *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order* (New York, NY: Simon & Schuster, 1996), 144.

⁸ Zurcher, *Turkey : A Modern History*, 172-173.

⁹ "History of Turkey and European Union" *Turkey For You*, http://www.turkeyforyou.com/turkey_european_union_history (diakses 18 September 2013)

komunitas masyarakat Eropa, Turki kemudian secara formal mengajukan aplikasi keanggotaan Uni Eropa pada tahun 1987.

Aktifitas luar negeri Turki sejak era Atatürk hingga tahun 1990-an yang sangat erat dengan Barat serta sekularisasi yang dijalankan oleh Atatürk memunculkan dualisme identitas masyarakat Turki. Terdapat istilah *White Turks* untuk mengidentifikasi masyarakat Turki yang identik dengan identitas Eropa dan *Black Turks* untuk mengidentifikasi masyarakat Turki yang identik dengan identitas Asia meski demikian mayoritas masyarakat Turki tetap didominasi agama Islam.¹⁰ Walaupun telah terlibat dengan beberapa organisasi negara-negara Eropa dan identitas Eropa telah muncul dalam masyarakat Turki, aplikasi keanggotaan Uni Eropa yang diajukan oleh Turki tidak begitu saja diterima oleh Uni Eropa dan diabaikan. Ada beberapa pertimbangan mengapa Uni Eropa tidak langsung menerima Turki menjadi anggota, paradigma mengenai Turki masih dipandang sebagai negara Muslim¹¹ menjadi alasan utama penolakan Uni Eropa selain beberapa faktor lain seperti budaya yang cenderung dekat dengan Asia, dan tingkat perekonomian Turki yang tidak cukup tinggi.

Pemilihan umum Turki pada tahun 2002 diperkirakan menjadi momentum proses bergabungnya Turki dengan Uni Eropa akan berhenti tanpa hasil akhir. Pemilu Turki tahun 2002 dimenangkan oleh partai AKP yang berhasil mendominasi 2/3 kursi pemerintah¹² sedangkan posisi Perdana Menteri dimenangkan oleh Recep Tayyip Erdogan. Dengan latar belakang Islam, Erdogan

¹⁰ In Turkey, Forging a New Identity (<http://www.nytimes.com/2012/12/01/world/europe/01iht-currents01.html?pagewanted=all&r=0>) (diakses 23 maret 2014)

¹¹ Huntington, *Clash of Civilization*, 146.

¹² Soner Cagaptay, "The November 2002 Elections and Turkey's New Political Era," <http://www.gloria-center.org/2002/12/cagaptay-2002-12-04/> (diakses 8 Oktober 2013).

melakukan reformasi seperti yang pernah dilakukan oleh Atatürk. Erdogan berupaya untuk mengembalikan Turki seperti pada masa kekhalifahan Utsmani yang mampu menciptakan kondisi domestik tanpa menyingkirkan etnis tertentu dengan tujuan membentuk kondisi Turki yang lebih stabil. Reformasi yang dilaksanakan oleh Erdogan memunculkan kekhawatiran dari publik Internasional dan pihak militer Turki akan bergesernya kebijakan luar negeri Turki akan kembali condong ke dunia Islam dan Timur Tengah.¹³

Erdogan pada awal masa pemerintahan bertindak hati-hati dalam mengartikulasikan kebijakan domestik dan luar negeri yang identik dengan nilai-nilai Islam. tindakan hati-hati Erdogan dilakukan dengan tujuan meredam kekhawatiran dari kelompok sekular dalam negeri dan pihak-pihak eksternal. Namun apa yang dicapai oleh pemerintah Erdogan menurut fakta yang ada justru jauh dari kekhawatiran dan dugaan pihak sekular dan eksternal. Kekhawatiran akan dampak yang akan terjadi akibat pergeseran politik luar negeri Turki untuk lebih condong terhadap Timur Tengah dari yang sebelumnya condong terhadap Barat hanya berlangsung di awal pemerintahan Erdogan. Pemerintah Turki justru mengalami proses demokratisasi sistem pemerintahan politik yang signifikan baik dengan pihak internal maupun eksternal. Erdogan beserta partai AKP kemudian mengubah kebijakan-kebijakan domestik dan Internasional dengan cara mengurangi kontrol militer dalam penentuan kebijakan sehingga hubungan dengan aktor internasional bisa dilakukan melalui *Soft Power*.¹⁴

¹³ Barkey, *Turkish Foreign Policy*, 3-4.

¹⁴ Barkey, *Turkish Foreign Policy*, 3-4.

Politik luar negeri yang dijalankan oleh Turki pada masa kepemimpinan Erdogan adalah strategi politik multi dimensi sekaligus dengan pendekatan *zero problem policy with neighbour*¹⁵ sebuah politik yang berpijak pada kondisi geostrategis Turki. Sebagai langkah awal, regional Timur Tengah menjadi fokus perhatian Turki terutama dalam rangka normalisasi hubungan dengan negara-negara seperti Iraq, dan Syria. Menggali kembali arti penting Timur Tengah dilakukan Turki dengan tujuan memperkuat kedudukan internasional dan kemajuan dalam negeri.¹⁶ Fokus Turki terhadap Timur Tengah kemudian diperluas menuju regional lain dengan dilakukannya normalisasi hubungan dengan Armenia. Terlebih pada tahun 2005 Turki justru mengajukan proposal keanggotaan terhadap Uni Eropa serta berhasil membuka dan menjalankan proses negosiasi keanggotaan Turki ke dalam Uni Eropa, kemajuan yang terhitung signifikan dalam 40 tahun proses negosiasi keanggotaan Turki.¹⁷ Dualisme poros kebijakan geopolitik Turki mulai terlihat ketika di satu sisi Turki berusaha memperkuat posisinya di regional Timur Tengah dan di sisi lain mencoba untuk menunjukkan posisi penting Turki bagi Uni Eropa.¹⁸

Turki dengan tingkat perekonomian keenam belas dikehendaki oleh Erdogan memiliki peran yang lebih dalam politik internasional. Dengan modal perekonomian yang kuat dan posisi geografi yang strategis apa yang diimpikan

¹⁵ Taghian, *Erdogan*, 294.

¹⁶ Normalisasi hubungan diplomatik dengan Iraq yang sebelumnya mengalami pembekuan akibat adanya KRG (*Kurdistan Regional Government*) di wilayah Iraq akibat adanya keterkaitan langsung dengan gerakan gerilya suku Kurdi di wilayah Turki. Normalisasi hubungan dengan Iraq turut menjaga kestabilan kondisi domestik.

¹⁷ Mehmet Ugur and Nergis Canefe, *Turkey and European Integration : Accession Prospects and issues* (New York, NY: Routledge, 2004)

¹⁸ Christoph Sydow, "Turkey and EU: Erdogan Visit to Berlin Betrays Tensions" *Spiegel Online*, October 31, 2012, <http://www.spiegel.de/international/europe/turkish-prime-minister-erdogan-sets-deadline-for-eu-admission-a-864579.html> (Diakses 8 Oktober 2013)

oleh Turki adalah bukan sekedar menjadi negara terminal penghubung di benua Euroasia, melainkan Turki sebagai aktor global strategis yang memiliki peran di berbagai regional bahkan global. Namun tujuan Erdogan yang paling penting adalah menjadikan Turki sebagai model percontohan baru dan ideal, menjadi teman bagi Islam, liberalisme, dan sekularisme.¹⁹ Beberapa pengamat juga menilai bahwa Turki bukan mengalami pergeseran ideologi dari sekularisme menuju nilai-nilai Islam yang menyebabkan adanya pergeseran kebijakan geopolitik namun yang sesungguhnya terjadi di Turki adalah meningkatnya nasionalisme dan kepercayaan diri.²⁰

I.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini kemudian mengajukan dua pertanyaan yang saling berkaitan:

1. Bagaimana proses redefinisi sekularisme Turki berlangsung?
2. Bagaimana Erdogan mengimplementasikan perubahan konsepsi sekularisme Turki dalam kebijakan domestik dan politik luar negeri?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perkembangan sekularisme di Turki dengan kultur Islam yang cukup kuat dan mengalami redefinisi di tiga era pemerintahan. Fokus riset ialah pada analisis mengenai ciri khas dari penerapan nilai sekularisme beserta dampaknya terhadap kebijakan domestik maupun luar negeri Turki pada era pemerintahan Erdogan.

¹⁹ Syarif Taghian, *Erdogan*, 249.

²⁰ Ryan Kennedy & Matt Dickenson, "Turkish Foreign Policy and Public Opinion" (paper presented at the Program Annual Meeting of The Western Political Science Association, 2011), 172.

I.4 Kerangka Pemikiran

I.4.1 Pendekatan Konstruktivisme sebagai Dasar Pemikiran

Dalam menganalisis bagaimana kebijakan luar negeri sebuah negara terbentuk, pendekatan Realisme dan Liberalisme kurang bisa menjelaskan apa dan bagaimana sebuah kebijakan luar negeri terbentuk. Untuk menjelaskan kasus yang diangkat penulis mengenai kebijakan luar negeri Turki yang terpengaruh oleh identitas masyarakat Turki pendekatan Realisme dan Liberalisme dirasa kurang menjelaskan bagaimana identitas masyarakat yang cenderung abstrak mampu mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri sebuah negara. Oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan lain yaitu pendekatan konstruktivisme.

Konstruktivisme hadir sebagai kritik terhadap perspektif kaum rasionalis yang menyatakan bahwa aktor dalam hubungan internasional bersifat rasional dimana segala tindakannya dibentuk oleh struktur yang ada. Konstruktivisme memandang bahwa struktur material baik berupa *power* ataupun kapitalisme dapat memberikan makna bagi perilaku manusia karena makna tersebut terletak di dalam struktur pengetahuan bersama yang ada dan struktur pengetahuan ini turut membentuk identitas dari aktor-aktor yang ada.²¹ Berdasarkan asumsi tersebut, konstruktivisme berargumen bahwa sistem-sistem ide, kepercayaan dan nilai bersama juga memiliki karakteristik struktural dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap tindakan-tindakan politik dan sosial. Fokus kepada identitas kemudian merujuk pada asumsi konstruktivisme yang kedua yaitu bahwa identitas adalah

²¹ Burchill, Linklater dan Devetak et. al., *Theories of International Relation* (New York, NY: ST Martin's Press, 1996), 196.

dasar dari kepentingan.²² Hal ini menunjukkan bahwa konstruktivisme menolak pandangan kaum rasionalis bahwa aktor adalah makhluk rasional yang mana kepentingannya muncul karena faktor-faktor eksternal. Walaupun demikian, konstruktivisme tidak menolak bahwa struktur merupakan determinan dari perilaku aktor.

Struktur material baik berupa *power* ataupun kapitalisme dapat memberikan makna bagi perilaku manusia karena makna tersebut terletak di dalam struktur pengetahuan bersama yang ada dan struktur pengetahuan ini turut membentuk identitas dari aktor-aktor yang ada merupakan asumsi dasar dari konstruktivisme.²³ Berdasarkan asumsi tersebut, konstruktivisme berargumen bahwa sistem-sistem ide, kepercayaan dan nilai bersama juga memiliki karakteristik struktural dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap tindakan-tindakan politik dan sosial. Fokus kepada identitas kemudian merujuk pada asumsi konstruktivisme yang kedua yaitu bahwa identitas adalah dasar dari kepentingan.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa konstruktivisme menolak pandangan kaum rasionalis bahwa aktor adalah makhluk rasional yang mana kepentingannya muncul karena faktor-faktor eksternal. Argumen konstruktivisme berdasar asumsi yang kedua tersebut kemudian adalah identitas aktor dapat menentukan kepentingan yang dibawanya dan diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang diambilnya.

Konstruktivisme juga memandang bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang mutlak, Oleh karena itu, kaum konstruktivis juga berpendapat bahwa tidak

²² Burchill, Linklater dan Devetak et. al., *Theories of International Relations*, 197.

²³ Burchill, Linklater dan Devetak et. al., *Theories of International Relations*, 196.

²⁴ Burchill, Linklater dan Devetak et. al., *Theories of International Relations*, 197.

ada kenyataan sosial yang objektif.²⁵ Dalam pandangannya, konstruktivisme mencoba mengkritik asumsi pendekatan realisme dan turunannya, neorealisme. Seperti yang diketahui, realisme dan neorealisme menganggap bahwa sistem internasional yang terjadi adalah sistem anarki. Di mana setiap negara bersikap preventif dalam berhubungan dengan negara lain. Namun menurut kaum konstruktivis, sistem anarki yang terjadi bukanlah suatu sistem yang kekal dan telah ada. Menurut Wendt anarki adalah apa yang dibuat negara darinya. Dengan kata lain konstruktivis menilai sistem anarki ini hanyalah sebuah konstruksi pemikiran dari negara. Jika suatu negara menginginkan hubungan yang anarki dengan negara lain, maka sistem yang tercipta pun akan menjadi sistem anarki. Begitu pula sebaliknya, jika negara menginginkan hubungan yang damai dan tidak anarki, maka sistem anarki pun tidak akan tercipta. Dan oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan Konstruktivisme sebagai dasar kerangka pemikiran.

1.4.2 Aspirational Constructivist

Bozdagioglu, menyebutkan bahwa menurut pendekatan konstruktivisme tidak hanya faktor eksternal yang mempengaruhi terbentuknya kebijakan luar negeri suatu negara tetapi faktor internal turut menjadi komponen terbentuknya suatu kebijakan luar negeri.²⁶ Sedangkan dalam pendekatan konstruktivis terdapat beberapa asumsi dasar mengenai hal-hal yang mengonstruksi sebuah kebijakan luar negeri yaitu *national identity, national self-image, strategic culture, religion,*

²⁵ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations* (Oxford: Oxford University Press, 1999), 307-310.

²⁶ Yucel Bozdagioglu, *Turkish Foreign Policy and Turkish Identity* (New York, NY: Routledge, 2003)

national role, dan *ideology*.²⁷ Disini penulis kemudian menggunakan konsep *national identity* sebagai faktor yang mengonstruksi pembentukan kebijakan luar negeri. Beberapa tokoh konstruktivis yang mencoba melihat pengaruh identitas terhadap pembentukan kebijakan luar negeri adalah Alexander Wendt, Ted Hopf, Serta Anne Clunan.

Alexander Wendt yang tergolong dalam *structural constructivist* beranggapan bahwa identitas nasional sebuah negara terbentuk karena pandangan negara lain terhadap suatu negara yang bersangkutan.²⁸ Oleh karena itu menurut Wendt identitas sebuah negara dibentuk oleh negara lain dan sistem internasional bukan oleh negara itu sendiri. Sedangkan Ted Hopf yang juga termasuk sebagai tokoh konstruktivis berpendapat jika identitas nasional merupakan struktur yang menjadi dasar dari tindakan suatu negara, termasuk kebijakan luar negeri oleh karena itu Hopf menilai jika identitas nasional memiliki arti penting dalam perumusan kebijakan luar negeri. Menurut Hopf identitas merupakan suatu hal yang pasti dan tidak akan berubah karena berupa struktur yang dihasilkan antara interaksi *self* dan *others*.²⁹ Jadi bisa ditarik kesimpulan dari definisi oleh Hopf adalah identitas suatu negara akan selalu sama dan tidak akan mengalami perubahan. Pendekatan yang dikemukakan oleh Wendt dan Hopf kurang bisa menjelaskan identitas dan kebijakan luar negeri Turki mulai dari era kepemimpinan Ataturk hingga Erdogan. Sangat jelas bagaimana Ataturk melakukan reformasi tanpa campur tangan pihak eksternal dengan tujuan

²⁷ Radityo Dharmaputra, 20143 "Culture and National Identity". PPT Mata Kuliah Perbandingan Politik Luar Negeri 17 Oktober 2013. Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya.

²⁸ Alexander Wendt, "Collective Identity Formation and International State" *The American Political Science Review*, 88(2)(1994) : 384-396

²⁹ Peter J. S. Duncan, review of Social Construction of International Politics: Identities and Foreign Policies, by Ted Hopf, *International Affairs* 79(5) (October 2003): 1131-1132.

mengubah identitas Turki yang awalnya identik dengan Islam menjadi lebih sekular dan reformasi yang dilakukan Atatürk berhasil.

Tokoh konstruktivis lain yang berbicara mengenai identitas nasional adalah Anne Clunan dengan *Aspirational Constructivist* yang berfokus pada bagaimana identitas nasional terbentuk dan bagaimana bentuk identitas nasional sehingga menjadi pertimbangan elit politik untuk membentuk kebijakan luar negeri.³⁰ Dasar dari pemikiran *Aspirational Constructivist* adalah, identitas nasional suatu negara dibentuk oleh aspirasi historis suatu bangsa. Elit politik pengambil kebijakan kemudian menentukan aspek historis yang dipadukan dengan kondisi saat ini sehingga aspek historis dinilai memiliki pengaruh terhadap kebijakan luar negeri.³¹ Identitas negara tidak pernah menjadi identitas tunggal dalam pandangan *Aspirational Constructivist*, identitas nasional hanya menjadi sebuah diskursus yang kemudian dipilih oleh elit politik pengambil kebijakan sesuai dengan kondisi negara. Dalam hal kebijakan luar negeri, *Aspirational Constructivist* memandang jika kepentingan nasional sebuah negara yang mempengaruhi kebijakan luar negeri, namun kepentingan nasional tidak selalu terbentuk oleh materi namun juga terbentuk oleh identitas, norma, dan faktor-faktor sosio kultur lainnya.³²

I.4.3 Sekular, Sekularisme, dan Sekularisasi

Pertama kali muncul pada abad ke-16 di Inggris, secara umum pengertian dari sekularisme adalah pemisahan hampir seluruh aspek kehidupan dan

³⁰ Anne L. Clunan, *The Social Construction of Russia's Resurgence : Aspirations, Identity, and Security Interests* (Baltimore : The John Hopkins University Press, 2009), 22.

³¹ Clunan, *Social Construction*, 8.

³² Clunan, *Social Construction*, 5.

pemikiran dari campur tangan agama dan kendali gereja.³³ Secara dasar pemikiran sekularisme memiliki tiga konsep dasar yaitu sekular, sekularisme, dan sekularisasi. Konsep dasar yang ada memiliki perbedaan analisis yang perlu dipahami karena ketiga konsep sangat terkait namun digunakan berbeda sesuai dengan disiplin akademik, sosial politik, dan budaya. Perbedaan analisis dasar dari konsep yang ada antara lain, sekular adalah sebuah teori atau ide tentang reposisi agama, sedangkan sekularisme merupakan sebuah ideologi, dan sekularisasi adalah proses diferensiasi pada lembaga atau sub sistem di bawahnya dalam rangka proses modernisasi.³⁴

Pemikiran mengenai sekularisme muncul disebabkan semakin meningkatnya otoritas gereja atas segala aspek kehidupan manusia di Eropa. Penelitian dan pemikiran yang dianggap melanggar aturan agama, dilarang oleh gereja meski membawa dampak baik bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Istilah sekularisme melalui perjalanan semantiknya kemudian berkembang dalam hubungannya dengan ide-ide modernitas, humanisme, rasionalisme, dan demokrasi. Penyebaran ide sekularisme hingga negara-negara muslim pada akhirnya menimbulkan definisi yang berbeda di tiap daerah. Sekularisme yang dipahami di Eropa dan di negara-negara Muslim mengalami perbedaan karena faktor pemahaman dan pengalaman politik.³⁵

³³ Smith, Charles D, "Secularism", in Esposito, John L. *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, vol. 4. (New York and Oxford: Oxford University Press, 1995), 20-30.

³⁴ Craig Calhoun, Mark Juergensmeyer, and Jonathan VanAntwerpen., *Rethinking Secularism* (New York : Oxford University Press, 2011)

³⁵ Muhammad Khalid Masud, *Asian Journal of Social Science*, Vol. 33, No. 3, SPECIAL FOCUS: Islam between Holism and Secularism (2005), pp. 363-383

Sekularisme yang membawa faktor agama sebagai identitas pada akhirnya masuk dalam salah satu kajian politik internasional atau hubungan internasional dikarenakan mampu menimbulkan pergerakan hingga melewati batas antar negara. Dalam hubungan internasional pemikiran sekularisme memiliki dua mazhab utama yaitu *laicist trajectory* atau *laicism* yang berasumsi dasar bahwa agama merupakan musuh dan menghalangi berlangsungnya politik modern dan *Judeo-Christian secularist trajectory* yang disebut sebagai bentuk sekularisme modern beranggapan bahwa agama merupakan sumber identitas dan persatuan yang menjadi awal dari timbulnya konflik dalam politik internasional modern.³⁶ Dari kedua mazhab diatas, baik *laicism* ataupun *judeo-christian* jika ditarik kesimpulan sama-sama memiliki anggapan jika agama merupakan sumber masalah bagi politik modern. Namun penganut paham sekularisme menolak anggapan jika sekularisme disamakan dengan atheisme, karena sekularisme bukan menolak adanya Tuhan namun lebih menekankan bahwa agama adalah urusan privat tiap individu.

Laicism sering diasosiasikan dengan definisi yang berasal dari Chatterjee³⁷ sebagai sebuah proses pemaksaan oleh hukum negara, propaganda pemerintah, dan media untuk membentuk masyarakat sekular agar menyetujui jika permasalahan agama hanya menjadi kepentingan privat. Sekularisme *laicism* menjadi sebuah bentuk sekularisme yang menjadi dasar dari terbentuknya politik modern. Mazhab ini diaplikasikan di beberapa negara seperti Perancis, Turki, Uni Soviet, Cina, dan berbagai negara lainnya. Pada umumnya sekularisme *laicism*

³⁶ Elizabeth Shakman Hurd, *The Politics of Secularism in International Relations* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2008), 23.

³⁷ Partha Chatterjee merupakan seorang Ilmuwan multidisipliner yang berasal dari India, memiliki bidang keahlian ilmu politik, antropologi, dan sejarah.

diterapkan ketika sebuah negara sedang mengalami revolusi industri atau modernisasi serta membentuk masyarakat yang patuh terhadap kebijakan sebuah negara³⁸. Dengan memisahkan agama dari urusan politik, diharapkan negara sanggup menentukan sebuah kebijakan tanpa harus mempertimbangkan norma atau nilai-nilai agama tertentu.

Sekularisme *Judeo-Christian* memiliki pandangan yang berbeda dengan *laicism* dalam memposisikan agama. *Judeo-Christian* meski menganggap jika agama merupakan sumber konflik masih mampu diakomodasi terkait keterlibatan dengan politik. Seperti kondisi yang terjadi di Amerika Serikat agama diyakini menjadi sumber landasan moral dalam eksistensi politik, selain itu agama³⁹ juga berfungsi sebagai “pendeta” untuk melegitimasi otoritas politik.⁴⁰ Bagaimana agama dan negara bisa bersatu berasal dari tradisi Eropa, dan *Judeo-Christian* cenderung melakukan akomodasi dengan agama dibandingkan menghindari agama. *Judeo-Christian* menjadi bagian dari sumber terbentuknya politik kontemporer baik domestik ataupun internasional mengacu pada bagaimana sebuah tradisi agama tertentu secara implisit terkait dengan sebuah peradaban. Meski agama menjadi sumber pembentukan perpolitikan atau kebijakan sebuah negara, namun agama tidak pernah melakukan intervensi terhadap pengambilan kebijakan oleh pemerintah seperti bagaimana yang terjadi di Amerika Serikat.⁴¹ Berlaku sebaliknya, negara turut memberikan kebebasan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menentukan agama ataupun kepercayaan.

³⁸ Shakman, *Politics of Secularism*, 30.

³⁹ Agama yang dimaksud dalam sekularisme *Judeo-Christian* adalah agama Kristen Yahudi.

⁴⁰ Shakman, *Politics of Secularism*, 38.

⁴¹ Shakman, *Politics of Secularism*, 40.

Penulis kemudian menarik kesimpulan bahwa, sekularisme merupakan sebuah diskursus yang masih akan berkembang kedepannya. Agama pada sekularisme *Laicism* yang diposisikan hanya sebagai urusan privat individu masyarakat kemudian berkembang menjadi salah satu instrumen pembentuk eksistensi politik dalam sekularisme *Judeo-christian* meski tanpa adanya sebuah intervensi terhadap kebijakan politik yang dibuat.

I.4.4 Sekularisme dan Islam

Konsep sekularisme yang mampu berkembang pesat di negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama non-Islam justru mengalami penolakan di negara dengan nilai-nilai Islam yang kuat. Faktor penghambat tumbuhnya sekularisme di negara-negara Islam diakibatkan adanya kewajiban untuk patuh terhadap perintah Tuhan yang terwujud melalui apa yang disebut hukum syariah.⁴² Konsep sekularisme kemudian juga berbenturan dengan prinsip dasar ideologi Islam yang memandang jika kedaulatan adalah milik Tuhan dan manusia tidak memiliki otoritas legislasi. Hukum syariah kemudian menjadi suatu hal yang pasti dan hanya bersumber dari Al-qur'an dan Sunnah sehingga manusia tidak memiliki kuasa untuk membentuk hukum baru di luar hukum syariah.

Prinsip dasar agama Islam kemudian bertolak belakang dengan ide-ide sekularisme yang menuntut ketiadaan campur tangan atau intervensi agama dalam dunia politik. Masyarakat Eropa dan pihak Barat kemudian memandang bahwa Islam merupakan sekelompok fundamentalisme yang hanya akan menghambat terjadinya modernisasi. Islam yang diasosiasikan dengan hal negatif menjadi

⁴² Masud, "Islam between Holism and Secularism" pp. 370

faktor penting dibalik terbentuknya sekularisme *Laicism* di Eropa dan sekularisme *Judeo-Christian* di Amerika Serikat.⁴³ Shakman bahkan berpendapat jika asosiasi negatif terhadap Islam turut menjadi faktor berkembangnya aliran-aliran sekularisme diluar *Laicism* dan *Judeo-Christian*.

Meski Islam dengan mutlak menolak ide-ide pemisahan agama dari berbagai aspek kehidupan seperti pemerintahan, pendidikan, perekonomian, dan berbagai aspek lainnya namun Islam masih memandang jika Sekularisme bukan menolak keberadaan Tuhan. Sekularisme hanya berusaha memosisikan agama sebagai urusan privat dan menghindari adanya intervensi pihak gereja, namun Islam tetap tidak mendukung adanya ide sekularisme.⁴⁴ Sekularisme hanya akan mampu tumbuh di peradaban yang dalam undang-undang serta hukum yang digunakan murni syariah Islam karena hukum Islam yang sah hanya bersumber dari Al-Quran dan hadits. Maka jika sebuah negara menggunakan hukum selain hukum syariah maka negara tersebut dikategorikan bukan sebagai negara Islam.

Dari definisi bagaimana Islam memandang sekularisme, penulis kemudian menyimpulkan jika sebuah negara Islam dalam memutuskan sebuah kebijakan mempertimbangkan dan melibatkan nilai-nilai Islam maka negara tersebut dikategorikan tidak menganut ideologi sekular. Namun jika negara Islam dalam memutuskan sebuah kebijakan tidak mempertimbangkan dan melibatkan nilai-nilai Islam maka bisa dikatakan negara tersebut bukan lagi dikategorikan sebagai negara Teokratik dan menerapkan nilai sekular.

⁴³ Shakman, *Politics of Secularism*, 52.

⁴⁴ Masud, "Islam between Holism and Secularism," pp. 372

1.5 Argumentasi Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran, penulis berargumen Turki di bawah Erdogan menerapkan kembali nilai-nilai sekular dalam politik luar negeri yang diindikasikan oleh kebijakan pro terhadap Uni Eropa dan Barat secara umum yang sekular. Dalam hal ini, Erdogan memisahkan kepentingan dan kebijakan politik dari referensi seperti ajaran Islam.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat eksplanatif. Penulis bermaksud menyelidiki karakter dan relasi antara prinsip sekularisme Erdogan dengan implementasi politik luar negeri Turki.

1.6.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis untuk mendeskripsikan bagaimana sekularisme berkembang di Turki dalam tiga era yakni era Ottoman tahun 1800 sampai tahun 1922, era Atatürk mulai tahun 1923 sampai tahun 1945, dan era Erdogan tahun 2002 sampai tahun 2011.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Sumber yang digunakan dalam teknik pengumpulan data adalah sumber sekunder berupa dokumen tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel majalah dan koran, situs internet ataupun pidato dan wawancara yang dilakukan pihak luar sebelum penelitian ini dilakukan. Teknik studi pustaka dilakukan oleh peneliti

karena keterbatasan waktu dan biaya sehingga teknik yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah studi literatur.

I.6.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif karena data yang didapat berupa kasus-kasus, artikel yang dimuat dalam media, maupun pernyataan-pernyataan dari pihak terkait. Analisis kualitatif sendiri menurut Miles dan Huberman terdiri dari tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁴⁵ Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di dalam penelitian dilakukan untuk reduksi data. Selanjutnya adalah penyajian data yang terdiri dari sekumpulan informasi tersusun agar kemudian bisa dilakukan penarikan kesimpulan diambil tindakan. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi.⁴⁶

I.6.5 Sistematika Penulisan

Argumentasi penelitian dikembangkan ke dalam pembahasan yang terdiri atas :

Bab II membahas tentang sekularisme pada era Ottoman dan Ataturk serta dampak penerapan nilai sekularisme terhadap kebijakan domestik dan luar negeri Turki.

Bab III membahas tentang sekularisme pada era Erdogan serta dampak penerapan sekularisme terhadap kebijakan domestik dan luar negeri Turki.

⁴⁵ Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, 311.

⁴⁶ Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, 311-313.

Bab IV mengevaluasi proses redefinisi sekularisme yang sedang berlangsung di Turki berdasarkan pada kecenderungan yang teridentifikasi pada bab 2 dan bab 3;

Bab V merupakan kesimpulan menegaskan kembali argumentasi yang dibuat dengan fakta-fakta pendukung. Selain itu disampaikan pula area untuk kajian lebih lanjut.

